

## Strategi Pengelolaan untuk Pengembangan Hutan Rakyat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang

### *Management Strategy for Private Forest development in Rancakalong District, Sumedang Regency*

Oleh:

**Hafiz Fauzan<sup>1\*</sup>, Endah Sulistyawati<sup>1</sup>, Tien Lastini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Biomanajemen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung  
Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132  
E-mail: hafizfauzan06@gmail.com

#### ABSTRAK

Kayu merupakan salah satu sumber alam yang dibutuhkan oleh manusia. Tingginya laju pertumbuhan populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan kayu semakin meningkat. Salah satu penghasil kayu terbesar di Jawa Barat saat ini adalah hutan rakyat. Pemenuhan terhadap permintaan kayu yang tinggi harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, agar tidak mengancam kelestarian hutan rakyat. Kecamatan Rancakalong adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi hutan rakyat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan hutan rakyat dan merumuskan strategi pengembangan hutan rakyat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara, pengamatan di lapangan, serta pengumpulan data sekunder. Sampel petani hutan rakyat yang diambil sebanyak 98 responden. Wawancara terhadap aparat pemerintahan dan tengkulak menggunakan teknik *snowball sampling*. Hasil analisis tahap input memiliki nilai total skor bobot internal 2,70 yang menunjukkan kondisi internal pada tahap sedang dan faktor eksternal 3,17 yang menunjukkan respon masyarakat terhadap ancaman dan peluang cukup kuat. Pada tahap pencocokkan didapatkan hasil bahwa pengelolaan hutan rakyat berada di kuadran II, yaitu masuk dalam tahap pertumbuhan (*growth*). Hasil analisis ditahap keputusan diperoleh strategi yang menjadi prioritas pertama untuk dijalankan yaitu membangun kelompok petani hutan rakyat Kecamatan Rancakalong.

**Kata kunci:** hutan rakyat, pengelolaan, strategi, Rancakalong

#### ABSTRACT

*Wood is one of the natural resources needed by humans. The high growth rate of the human population causes an increase in demand for wood. Currently, one of the largest timber producers in West Java is private forests. Fulfillment of high demand for wood should be balanced with good management, so that is not to threat private forest sustainability. One of the areas with the private forest that is still actively undertaking private forest management activities is in Rancakalong District, Sumedang Regency. This study aims to identify the current management practice of private forests and to formulate sustainable development strategies. The data was collected through questionnaires and interviews, field observation, and secondary data collection. The respondent number of private forest farmers was 98 respondents. Snowball sampling techniques were used to interview government officials,*

*middlemen or wood dealers. The analysis results at the input have an internal total score of 2,7, which shows the condition is at the medium stage and external total score of 3,17, which shows the public response to threats and opportunities are strong enough. At the matching stage, the result is that the management of private forest is the second quadrant, which means that the private forest is entering the growth stage. The study result shows that the first priority to be implemented in the Rancakalong private forest is to establish farmer organizations.*

**Keywords:** *private forest, management, strategic, Rancakalong*

## PENDAHULUAN

Hutan alam merupakan salah satu penghasil utama kayu pada tahun 1980-1990 (FWI/GFW 2001). Kurangnya alternatif penghasil kayu dan pengelolaan hutan yang tidak tepat, menyebabkan terjadinya deforestasi. Tingginya laju deforestasi hutan alam, salah satunya dipicu oleh kebutuhan kayu yang meningkat (Forest Watch Indonesia 2014). Meningkatnya populasi manusia akan berdampak pada peningkatan kebutuhan kayu. Kebutuhan kayu yang meningkat menyebabkan terjadinya pembalakan pencurian kayu pada hutan alam secara besar-besaran. Hal tersebut menyebabkan hutan alam Indonesia mengalami penurunan. CIFOR (2009) menunjukkan laju deforestasi di Indonesia pada rentang tahun 1985 – 1997 mencapai 1,7 juta ha/tahun. Pada rentang tahun 1997 – 2000 meningkat menjadi 2,8 ha/tahun, sedangkan pada rentang tahun 2000 – 2005 mengalami penurunan menjadi 1,2 juta ha/tahun. Kondisi tersebut menggambarkan keperluan akan kayu tidak bisa bergantung pada hutan alam. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengembangkan hutan tanaman. Pengembangan hutan tanaman berfungsi sebagai penyedia bahan baku kayu dalam jangka panjang, sehingga pemenuhan kebutuhan kayu tidak lagi bergantung pada hutan alam.

Salah satu hutan tanaman yang dapat menjadi pemasok kebutuhan kayu adalah hutan rakyat. Hutan rakyat merupakan salah satu bentuk hutan hak milik yang diusahakan oleh rakyat baik secara perorangan maupun ataupun badan usaha masyarakat. Hutan rakyat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan serta untuk pelestarian lingkungan hidup (Hardjanto 2001). Ketidakmampuan hutan alam dalam memenuhi kebutuhan pasokan kayu dapat memberikan peluang bagi hutan rakyat. Peluang tersebut diantaranya mengurangi kesenjangan yang ada antara penawaran dan permintaan, serta memenuhi kebutuhan kayu. Meski awal tujuan pembangunan hutan rakyat untuk penanganan lahan kritis, dalam perkembangannya hutan rakyat dimanfaatkan juga dimanfaatkan untuk menghasilkan produk dan mengatasi kerusakan hutan serta menekan erosi (Purwanto et al. 2004).

Hutan rakyat dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu apabila dikelola secara tepat, sehingga menghasilkan manfaat yang optimal dan hutan tetap lestari. Laporan Statistika Kehutanan Jawa Barat tahun 2016 menyatakan bahwa sekitar 90% pasokan kayu di Jawa Barat pada tahun 2016 dihasilkan dari hutan rakyat, dan salah satu pemasok kayu terbesar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sumedang. Salah satu wilayah di Kabupaten Sumedang yang aktif melakukan kegiatan pengelolaan hutan rakyat adalah Kecamatan Rancakalong. Saat ini pengelolaan hutan rakyat di Rancakalong belum optimal seperti diindikasikan dengan masih adanya masalah seperti belum terjaminnya kualitas dan kontinuitas produksi, tidak adanya kelompok petani, dan kurangnya pengetahuan petani terkait pengelolaan. Masalah-masalah tersebut apabila tidak ditangani dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong. Untuk mengoptimalkan

pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong diperlukan suatu informasi strategi yang dibangun dengan memperhatikan kondisi pengelolaan yang ada saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dan dilaksanakan pada bulan Januari – Mei 2018. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah petani yang mengelola lahan hutan rakyat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi di lapangan, kuesioner dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Jenis data primer yang dikumpulkan meliputi informasi pengelolaan hutan rakyat berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan yang dilihat adalah peran ekologis dan kesesuaian lahan, sedangkan aspek sosial mengkaji karakteristik petani dan masyarakat, struktur organisasi, budaya setempat, dan peran pemerintah. Aspek ekonomi yang dikaji adalah pengelolaan lahan, teknik silvikultur, potensi penjualan kayu, jalur pemasaran, dan kelayakan usaha. Responden dalam penelitian ini adalah petani hutan rakyat, masyarakat, aparat desa, dan pembeli kayu/bandar kayu. Pengambilan data persepsi petani mengenai lingkungan menggunakan skala likert dengan 4 kriteria yaitu buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi informasi kondisi iklim, demografi, dan mata pencaharian utama masyarakat. Parameter kondisi lingkungan meliputi jenis pohon, ketinggian, jenis tanah, curah hujan, dan suhu. Data sekunder tersebut diperlukan untuk perbandingan parameter kondisi lingkungan Rancakalong dengan syarat tumbuh jenis pohon yang ditanam petani.

Pemilihan responden menggunakan teknik *snowball*, sedangkan untuk penyebaran kuesioner dan wawancara kepada petani hutan rakyat menggunakan teknik Slovin (Amirin 2011) dengan rumus persamaan 1. Dimana  $n$  merupakan jumlah sampel;  $N$  merupakan jumlah populasi yang diketahui; dan  $D$  merupakan presisi yang diterapkan (dalam penelitian ini sebesar 10%).

$$n = \frac{N}{Nd^2+1} \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

Kelayakan usaha dihitung untuk menilai kondisi internal atau eksternal pada hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong. Hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong terbagi 2 yaitu hutan rakyat campuran (*polikultur*) dan *agroforestry*. Hutan rakyat campuran (*polikultur*) merupakan hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran tanpa tanaman musiman, sedangkan *agroforestry* merupakan hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha kombinasi antara kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya seperti tanaman pangan, perkebunan, dan lain-lain yang dikembangkan secara terpadu (Mustari 2000). Kelayakan usaha didapatkan dengan menghitung *Benefit Cost Ratio* (BCR), *Net Present Value* (NPV), dan *Internal Rate of Return* (IRR). Pengelolaan hutan rakyat dikatakan layak jika  $BCR > 1$ ,  $NPV > 0$ , dan IRR lebih besar dari suku bunga. Asumsi *discount rate* yang digunakan sebesar 10,8% dengan mengikuti suku bunga kredit bank BNI tahun 2017. Menurut Nurmalina et al. (2009), rumus persamaan BCR, NPV, dan IRR, yaitu pada Persamaan 2, Persamaan 3, dan persamaan 4. Dimana  $B_t$  merupakan penerimaan (*Benefit*) pada tahun ke- $t$ ;  $C_t$  merupakan biaya (*Cost*) pada tahun ke- $t$ ;  $t$  merupakan umur / lama suatu pengelolaan (tahun);  $i$  merupakan *discount rate* yang berlaku (%). Jika  $BCR > 1$  maka layak atau menguntungkan dan jika  $BCR < 1$  maka tidak layak atau merugikan. Jika  $NPV > 0$  maka layak atau menguntungkan dan dapat/layak dilaksanakan; Jika  $NPV = 0$  maka tidak untung dan tidak rugi, maka tergantung pada penilaian dari pengambil keputusan; dan Jika  $NPV < 0$  maka merugikan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

$$BCR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Bt}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{Ct}{(1+i)^t}} \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t} \dots\dots\dots \text{Persamaan (3)}$$

$$IRR = i1 + \frac{NPV1}{NPV1 + NPV2} (i2 - i1) \dots\dots\dots \text{Persamaan (4)}$$

Dimana  $i_1$  merupakan *discount rate* yang menghasilkan NPV positif;  $i_2$  merupakan *discount rate* yang menghasilkan NPV negatif;  $NPV_1$  merupakan NPV yang bernilai positif;  $NPV_2$  merupakan NPV yang bernilai negatif. Jika  $IRR > discount rate$  yang berlaku maka investasi layak dijalankan dan jika  $IRR < discount rate$  yang berlaku maka investasi tidak layak dijalankan.

Perumusan strategi pada penelitian ini menggunakan perumusan strategi yang dikembangkan oleh David (2011), terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap input data, tahap pencocokan data, dan tahap pembuatan keputusan. Pada tahap input, faktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang didapatkan pada tahap identifikasi pengelolaan hutan rakyat dimasukkan kedalam matriks EFE (*External Factor Evaluation*) dan IFE (*Internal Factor Evaluation*). Pada tahap pencocokan data, semua informasi yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat diolah dalam model kuantitatif perumusan strategi, dilakukan dengan menggunakan matriks IE (*Internal External*). Untuk mendapatkan strategi yang sesuai dengan kondisi hutan rakyat saat ini, menggunakan analisis matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Tahap keputusan dilakukan dengan menggunakan matriks QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*), setiap faktor kunci dicocokkan dengan strategi-strategi yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan parameter untuk menentukan kesesuaian lahan dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, tanaman kayu yang ditanam petani hutan rakyat Kecamatan Rancakalong telah sesuai dengan kondisi lingkungannya, kecuali pada jenis kayu afrika (*Maesopsis eminii*) dan jati putih (*Gmelina arborea*). Kedua jenis ini kurang sesuai pada parameter jenis tanah. Selain itu, kedua jenis pohon tersebut bukan tanaman utama yang dijual ataupun digunakan oleh petani. Sebanyak kurang dari 40% petani yang menanam jenis kayu afrika (*Maesopsis eminii*) dan jati putih (*Gmelina arborea*). Jenis tanaman kayu unggulan petani Rancakalong yaitu sengon (*Paraserianthes falcataria*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), dan surian (*Toona sinensis*). Jenis tersebut memiliki kondisi lingkungan yang mendukung. Kondisi tersebut menjadi suatu keunggulan dan menjadi modal yang baik untuk hutan rakyat yang lestari.

**Tabel 1.** Perbandingan parameter kondisi lingkungan Kecamatan Rancakalong dengan syarat tumbuh jenis pohon

Jenis Pohon	Parameter			Keterangan	
	Ketinggian (mdpl)	Jenis Tanah	Curah Hujan (mm/tahun) <sup>c</sup>		Suhu (°C) <sup>e</sup>
-	500-1600 <sup>(a)</sup>	Grumisol, Latosol, Andosol, Podsolik <sup>(b)</sup>	2000-4500 <sup>(c)</sup>	18-28 <sup>(d)</sup>	Rancakalong

Jenis Pohon	Parameter				Keterangan
	Ketinggian (mdpl)	Jenis Tanah	Curah Hujan (mm/tahun) <sup>c</sup>	Suhu (°C) <sup>c</sup>	
Sengon	0-1600	Latosol, Podsolik	2000-3500	18-27	Sesuai (Krisnawati et al. 2011)
Mahoni	0-1500	Andosol	1000-2500	20-28	Sesuai (Krisnawati et al. 2011)
Surian	1200-2700	Podsolik, Andosol	1120-4000	20-30	Sesuai (Orwa et al. 2009)
Kayu Afrika	700-1500	Lithosol, Laterit, Andosol	1200-3000	22-27	Kurang Sesuai (Orwa et al. 2009)
Tisuk	0-1400	Podsolik, Alluvial	2000-3500	20-30	Sesuai (Sudomo 2010)
Jati Putih	0-1200	Lithosol, Laterit	750-4500	20-28	Kurang Sesuai (Orwa et al. 2009)

Sumber: a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (2017), b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (2017) dan Sugianti et al. (2015), c. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Air 2017).

Data persepsi petani pada Tabel 2 menunjukkan bahwa hutan rakyat memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap kualitas udara pada siang hari maupun malam hari dan memberikan keteduhan pada lingkungan sekitar. Selain itu, petani menyatakan bahwa hutan rakyat memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas air dan ketersediaan air pada saat kemarau. Kualitas air tetap jernih dan cukup untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari (mandi, cuci, keperluan dilahan garapan seperti sawah, dan lain-lain). Pada musim kemarau, petani tetap mendapat ketersediaan yang cukup dan jarang kekurangan. Umumnya keberadaan hutan akan membantu mencegah terjadinya banjir. Tetapi petani Rancakalong beranggapan bahwa manfaat terkait penahan banjir sangat sedikit. Petani belum dapat memastikan hutan rakyat membantu dalam upaca pencegahan banjir. Hal ini dikarenakan belum pernah terjadi banjir didaerah Rancakalong.

**Tabel 2.** Manfaat hutan rakyat terhadap lingkungan berdasarkan persepsi petani.

Parameter	Manfaat Hutan Rakyat Terhadap Lingkungan
Kualitas air (untuk rumah, sawah, ladang, dll)	Baik (Manfaat Cukup)
Debit air (ketersediaan air) saat kemarau	Baik (Manfaat Cukup)
Penahan erosi	Sedang (Manfaat Sedikit)
Penahan longsor	Sedang (Manfaat Sedikit)
Pencegah banjir	Sedang (Manfaat Sedikit)
Suhu udara pada siang dan malam hari	Sangat Baik (Manfaat Banyak)
Keteduhan lingkungan sekitar	Sangat Baik (Manfaat Banyak)

Bagi petani Rancakalong, hutan rakyat memberikan pengaruh yang sedikit terhadap pencegahan longsor dan pencegahan erosi. Petani melakukan pengelolaan hutan rakyat berada di dataran yang relatif datar. Dilihat dari kondisi tersebut, petani beranggapan hutan rakyat memiliki sedikit pengaruh terhadap longsor dan erosi. Selain itu, menurut petani dan masyarakat pada dasarnya daerah Rancakalong sangat jarang terjadi longsor dan erosi. Menurut petani umumnya manfaat yang diberikan hutan rakyat sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi masyarakat keberadaan hutan rakyat secara umum

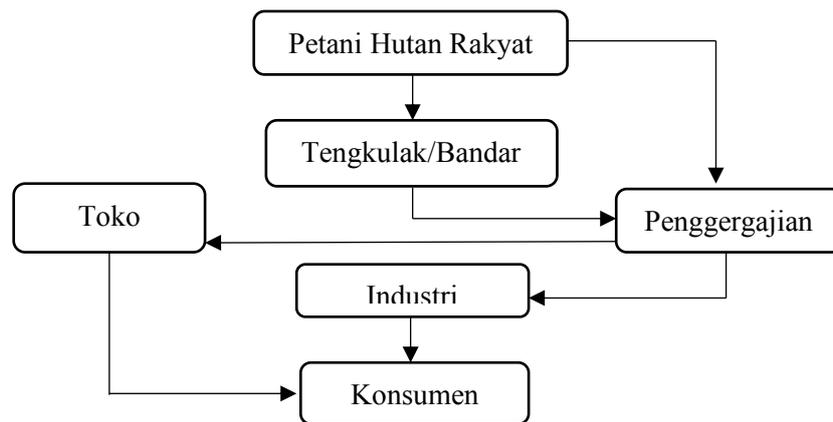
dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan. Keberadaan hutan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi iklim, sehingga hutan rakyat berfungsi sebagai tempat penimbunan, pengendapan karbon dan penghasil oksigen yang membuat udara sekitar menjadi lebih baik (Hardjanto 2001).

Masyarakat yang mengelola hutan rakyat sebanyak 80% termasuk ke dalam kelompok usia produktif (15 – 64 tahun). Suharto (2009) mengategorikan usia tersebut sebagai orang yang mampu bekerja secara maksimal dalam menghasilkan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan tersebut memungkinkan untuk menjadi suatu jaminan ketersediaan sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan rakyat. Usia petani sangat mempengaruhi suatu pengelolaan lahan. Semakin dewasa usia seseorang, dianggap semakin banyak pengalaman yang didapatkan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan (Hardjanto 2001).

Mata pencaharian utama di Kecamatan Rancakalong adalah berpetani, dengan luas lahan yang dimiliki berbeda-beda. Umumnya lahan garapan petani hutan rakyat Rancakalong berada pada lahan milik dengan rata-rata luas lahan 0,5 hektar. Standar luasan minimal hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2004 tahun 2004 adalah 0,25 hektar, sehingga dapat dikatakan Kecamatan Rancakalong banyak dijumpai lahan yang memenuhi standar luasan hutan rakyat. Ini merupakan kondisi yang baik untuk perkembangan hutan rakyat. Luas garapan yang cukup akan memudahkan petani untuk membagi lahan terhadap tanaman kayu dan tanaman musiman.

Hasil wawancara menunjukkan belum terbentuknya kelompok petani hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong. Kelompok hutan rakyat dapat menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan rakyat mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pasca panen, dan pengembangan usaha petani hutan rakyat. Pembentukan kelompok tani dapat menjadikan salah satu cara yang efektif untuk mendorong pengelolaan hutan rakyat lebih berkembang (Yumi et al. 2012). Sekitar 90% petani menyetujui adanya kelompok petani hutan rakyat. Hal ini menunjukkan petani memiliki harapan besar terkait pembentukan kelompok petani hutan rakyat. Selain itu, bantuan pemerintah terhadap hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong masih tergolong rendah, padahal pemerintah dapat mempunyai peran yang positif bagi perkembangan pengelolaan hutan rakyat (Kurniawan 2015).

Jalur pemasaran kayu hutan rakyat Kecamatan Rancakalong dapat dilihat pada Gambar 1. Petani hutan rakyat menjual kayu ke tengkulak atau langsung ke pengggajian terlebih dahulu sebelum sampai ke konsumen melalui jalur pengggajian ke toko material atau jalur pengggajian ke industri (mebel). Selain itu, terdapat beberapa petani yang mempunyai pengggajian sendiri. Petani tersebut berperan sebagai tengkulak atau bandar dan hasil kayunya dapat langsung dimanfaatkan. Jumlah petani yang mempunyai peran sebagai tengkulak atau bandar sangatlah sedikit, kurang dari 5% dari jumlah petani. Pada setiap desa minimal terdapat satu orang dan satu pengggajian, sehingga petani tidak akan kesulitan untuk menjual hasil kayu hutan rakyat. Selain itu, terdapat beberapa toko mebel dan toko material yang menjadi suplai kayu kepada konsumen. Hal ini menggambarkan struktur pasar kayu yang ada di Kecamatan Rancakalong sudah jelas.



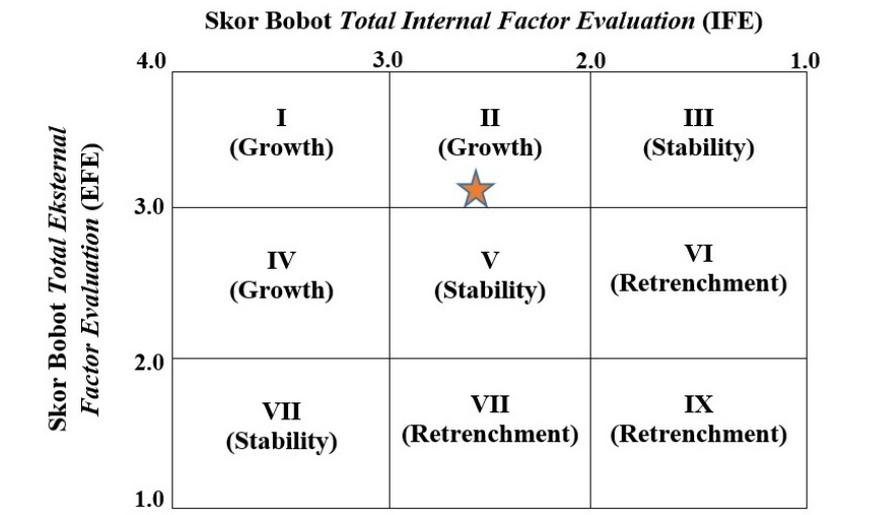
**Gambar 1.** Jalur pemasaran kayu hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong.

Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai BCR lebih dari satu, nilai NPV lebih besar dari nol dengan menggunakan *discount rate* sebesar 10,8%, serta nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 10,8%. Berdasarkan hasil tersebut, maka usaha petani hutan rakyat Kecamatan Rancakalong merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan yang besar dan layak untuk dijalankan. Hasil perhitungan kelayakan usaha dapat dilihat pada Tabel 3. Kelayakan usaha merupakan salah satu kekuatan untuk kelestarian hutan rakyat. Selain itu, modal yang dibutuhkan sedikit dan pengeluaran tenaga yang tidak banyak merupakan salah satu unggulan pengelolaan hutan rakyat.

**Tabel 3.** Hasil BCR, NPV, dan IRR, hutan rakyat Kecamatan Rancakalong.

Parameter	Sistem Penanaman Hutan Rakyat	
	Hutan Rakyat Campuran ( <i>Polikultur</i> )	<i>Agroforestry</i>
BCR	7,69	4,65
NPV	76.296.741,80	39.336.623,30
IRR	31,64%	27,59%

Pada tahap analisis aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi didapatkan faktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi pengelolaan. Pada tahap input didapatkan total skor pada masing-masing faktor internal dan eksternal. Nilai total skor faktor internal adalah 2,7, yang menunjukkan pengelolaan hutan rakyat Rancakalong memiliki kondisi internal sedang, berdasarkan kriteria David (2011). Sedangkan nilai total skor faktor eksternal adalah 3,17, yang menunjukkan respon pengelolaan hutan rakyat Rancakalong terhadap peluang dan ancaman cukup baik (David 2011). Berdasarkan matriks IE didapatkan posisi pengelolaan hutan rakyat Kecamatan Rancakalong berada pada kuadran II. Kondisi tersebut merupakan posisi pengelolaan dalam tahap perkembangan (*growth*). Strategi yang cocok pada posisi *growth* adalah strategi intensif (pengembangan produk, pengembangan pasar, dan penetrasi pasar) atau strategi integrasi (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). Matriks IE dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Matriks Internal Eksternal (IE)

Dari hasil analisis matriks SWOT didapatkan tujuh strategi. Terdapat dua strategi intensif (pengembangan produk) dan lima strategi integrasi (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). Dari ketujuh strategi alternatif akan dipilih prioritas suatu strategi yang dipilih dari matriks QSPM. Berdasarkan matriks QSPM didapatkan strategi dengan nilai *Total Attractiveness Score* (TAS) tertinggi sebesar 6,55 yaitu membangun kelompok petani hutan rakyat Kecamatan Rancakalong. Hasil matriks QSPM dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Matriks *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM).

No.	Strategi Alternatif	TAS	Prioritas
<b>Strategi Intensif</b>			
I	Mengatur pola tanam agar bisa menghasilkan kayu secara berkelanjutan dan lestari, untuk memenuhi permintaan pasar.	4,25	5
II	Mengembangkan kegiatan pembibitan bersama antar petani, dengan membangun lahan persemaian untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman dan memperkecilkan kualitas bibit yang tidak menentu	3,25	6
<b>Strategi Integrasi</b>			
III	Pemberian pelatihan, pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terkait pengelolaan hutan rakyat yang optimal.	5,325	2
IV	Membangun mitra kerja/kerjasama antara petani dengan <i>stakeholders</i> terkait dengan pemasaran kayu	4,5	4
V	Membangun kelompok petani hutan rakyat Kecamatan Rancakalong	6,55	1
VI	Membangun lembaga/organisasi petani untuk penyediaan dana terkait pengelolaan (koperasi simpan pinjam).	3,125	7
VII	Membangun kerjasama antara petani dengan pemerintah daerah, akademisi, ataupun LSM untuk membantu perkembangan hutan rakyat	5,025	3

## SIMPULAN

Hasil penelitian didapatkan tujuh pilihan strategi pengelolaan, diantaranya dua strategi intensif (pengembangan produk) dan lima strategi integrasi (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). Strategi tersebut dapat diusulkan agar pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong lebih efektif. Strategi alternatifnya sesuai dengan urutan prioritas strategi yang dijalankan (hasil matriks QSPM) yaitu: membangun kelompok petani hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong, pemberian pelatihan, pembinaan dan penyuluhan

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terkait pengelolaan hutan rakyat yang optimal, membangun kerjasama antara petani dengan pemerintah daerah, akademisi, ataupun LSM untuk membantu perkembangan hutan rakyat, membangun mitra kerja/kerjasama antara petani dengan *stakeholders* terkait dengan pemasaran kayu, mengatur pola tanam agar bisa menghasilkan kayu secara berkelanjutan dan lestari, untuk memenuhi permintaan pasar, mengembangkan kegiatan pembibitan bersama antar petani, dengan membangun lahan persemaian untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman dan memperkecilkan kualitas bibit yang tidak menentu, membangun lembaga/organisasi petani untuk penyediaan dana terkait pengelolaan (koperasi simpan pinjam).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. 2011. *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Erlangga, Jakarta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang. 2017. *Peta Topografi dan Curah Hujan Pada Tahun 2017*. Sumedang.
- CIFOR. 2009. *Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang Hutan, Perubahan Iklim, dan REDD*. CIFOR, Bogor.
- David, F. 2011. *Strategic Management, Concepts and Cases*. Pearson Education, New Jersey.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Hutan Indonesia yang terus Tergerus*. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia.
- Hardjanto. 2001. Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Pendapatan Rumah Tangga di SUB DAS Cimanuk Halu. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Bogor Agricultural University, Department of Forest Management 7(2): 47–61.
- Krisnawati, H., Varis, H., Kallio, M. H., and Kanninen, M. 2011. *Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen: Ekologi, silvikultur dan produktivitas*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor. DOI: 10.17528/cifor/003482
- Kurniawan, A. A. 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Universitas Gadjah Mada.
- Mustari, T. 2000. Kajian Penentuan Daur dan Kelestarian Hasil Pada Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi. IPB (Bogor Agricultural University).
- Nurmalina, R., Sarianti, D., and Karyadi, A. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadass, R., and Anthony, S. 2009. *Agroforestry Database: a tree reference and selection guide version 4.0*. World Agroforestry Centre, Kenya.
- Purwanto, S., Cahyono, A., Indrawati, D. R., and Wardoyo. 2004. Model-Model Pengelolaan Hutan Rakyat. in: *Prosiding Ekspose BP2TPDAS-IBB Surakarta* Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan, Bogor 7–12.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Air. 2017. *Laporan Curah Hujan dan Klimatologi Pada Tahun 2017*. Tidak Dipublikasikan.
- Sudomo, A. 2010. *Teknik Pembibitan Tisuk (Hibiscus macrophyllus Roxb Ex Hornem)*. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, Ciamis.
- Sugianti, K., Mulyadi, D., and Sarah, D. 2015. Klasifikasi Tingkat Kerentanan Gerakan Tanah Daerah Sumedang Selatan Menggunakan Metode Storie. *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan* 24(2): 93–104. DOI: 10.14203/risetgeotam2014.v24.86
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Yumi, Y., Sumardjo, S., Gani, D. S., and Sugihen, B. G. 2012. Kelembagaan Pendukung Pembelajaran Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari (Kasus di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan* 8(1): 15–28. DOI: 10.25015/penyuluhan.v8i1.9891